

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian analitis terhadap sistem pengelolaan pegawai bagi tenaga kependidikan PTNbh dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga penelitian ini akan selalu berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia. Oleh sebab itu, penelitian disertasi yang dilakukan Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami yang didasarkan pada tradisi-tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*) Bogdan dan Biklen (1990, hlm. 27) mengemukakan bahwa,

penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengamatan sendiri terhadap seperangkat kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat memahami makna dari interaksi antar manusia secara mendalam melalui bantuan pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi". Adapun peran peneliti sebagai *key instrumen* dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan mendatangi langsung sumber data; perspektif *emic* berperan sebagai instrumen untuk memahami dan menjelaskan situasi dan perilaku tenaga kependidikan di Universitas Pendidikan Indonesia.

Sementara, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (*case study*). Studi ini, menurut Stake dalam Creswell (2009, hlm. 20) dimaksudkan untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menggunakan metode studi kasus, karena menyangkut sesuatu yang terjadi sebagai dampak dari aktualisasi Otonomi PTNbh. Penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis studi kasus eksplanatoris, yaitu dengan membuat penjelasan-penjelasan sehubungan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan (Mengapa...?) yang kesemuanya pertanyaan-pertanyaan itu erat

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkelindan dengan peristiwa (*cases*) yang nyata terjadi yaitu (suatu keadaan) terabaikannya sebagian hak-hak kepegawaian yang dampaknya dirasakan langsung oleh para pegawai Tenaga Kependidikan di PTNbh.

Karena obyek penelitian ini ada keterkaitan dengan kelembagaan PTNbh dan kebijakan Publik, adalah Studi Kasus Berganda tipe 4 yaitu menganalisis multi kasus dengan multi analisis karena kasus yang terjadi berkaitan satu dengan lainnya, sehingga menjadi sangat rumit.

Dalam penelitian disertasi ini, Penulis juga menggunakan metode yuridis normatif, “karena”, sebagaimana dikemukakan oleh Riyanto (2006, hlm. 22) “dalam melakukan pengkajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada segi-segi dan analisis hukum peraturan perundang-undangan”. Soekanto dan Mamudji (1986, hlm. 15) menegaskan bahwa “penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal”.

Terkait dengan taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di atas, Riyanto (2010, hlm. 380-382.) menegaskan bahwa,

berdasarkan asas-asas hukum (*principles of legality*) antara lain, bahwa peraturan-peraturan itu tidak bertentangan satu sama lain; berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain, bahwa UU/peraturan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipertukarkan tingkat kedudukannya *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, dan peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah/dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah kedudukannya); dan adanya suatu sistem hukum positif dalam suatu negara apabila ditemukan: (1) adanya tatanan peraturan yang tersusun dalam struktur (hirarkikal) yang terurai dalam bagian-bagian; (2) bagian-bagian peraturan-peraturan yang lebih atas menjadi dan memberikan landasan bagi penyusunan peraturan-peraturan yang lebih rendah; (3) peraturan-peraturan yang lebih rendah mengacu dan taat asas kepada peraturan yang berada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut hemat penulis, dari pandangan ahli di atas dapat dimaknai bahwa peraturan-peraturan yang sejenis itu idealnya tidak tumpang tindih atau berbenturan satu sama lain. Menurut asas hierarki, peraturan-peraturan yang lebih atas menjadi dan memberikan landasan bagi penyusunan peraturan-peraturan yang

lebih rendah, dan peraturan-peraturan yang lebih rendah mengacu dan taat asas kepada peraturan yang berada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya

Selanjutnya terkait dengan Penelitian hukum normatif, menurut Soemitro (1982, hlm. 24-25) menegaskan bahwa,

Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap data sekunder, yang meliputi: 1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu dokumen-dokumen pribadi, dan data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di mana yang bersangkutan (pernah) bekerja); dan 2. Data sekunder yang bersifat publik, yaitu data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan (misalnya jurisprudensi Mahkamah Agung). Data sekunder bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi: 1. Bahan-bahan hukum primer, seperti norma dasar Pancasila; peraturan dasar: Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR; peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat (bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat); 2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian; dan 3. Bahan-bahan hukum tertier, misalnya bibliografi.

Semua data-data sekunder sebagaimana disebutkan dalam pandangan ahli tersebut di atas, secara langsung atau tidak langsung yang relevan dengan kasus tersebut dikumpulkan. Data yang telah diperoleh tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan coraknya sebagai sebuah kasus. Metode penelitian kasus menghasilkan suatu corak atau karakter tunggal yang menandai kasus tersebut. Metode ini juga menyajikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisis yang intensif dan mendalam mengenai unsur-unsur yang khusus dan terperinci yang tercakup dalam kasus tersebut.

Dengan menggunakan studi kasus ini penulis berharap dapat mendalami sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja tanaga kependidikan di PTNbh dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan antara lain dengan hak-hak warga negara (termasuk hak asasi manusia), hak ekonomi dan kesejahteraan warga negara, kebijakan publik dan sikap pemerintah atas kelembagaan dan ketenagaan di PTNbh.

Beberapa argumentasi dipilihnya metode studi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. studi ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan dalam menggunakan beragam teknik pengumpulan data sebagai sarana untuk menjangkau dimensi otentik dari permasalahan yang diteliti; dan
- b. memungkinkan peneliti dapat menggali dan mengkaji mengenai sistem kepegawaian dan sistem tunjangan kinerja PTNbh secara mendalam dan menyeluruh.

Selain argumentasi di atas, bahwa keunikan dari kasus yang diangkat di UPI ini bahwa: (mengadaptasi terminologi tentang isu aktual yang dipandang telah memenuhi kriteria menurut Lembaga Administrasi Negara, 2008, hlm. 8-9)

1. Isu kepegawaian yang **terjadi** di PTNbh adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat kampus yang sampai kepada Pemerintah.
2. Isu kepegawaian yang terjadi di PTNbh **mempunyai nilai kekhlayakan** karena secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, komunitas para pegawai Tenaga Kependidikan di PTNbh yang merasa dirugikan atas dampak dari implementasi kebijakan bidang kepegawaian.
3. Isu kepegawaian yang terjadi di PTNbh **memiliki nilai problematik**, karena menyimpang dari harapan, standar, dan ketentuan kepegawaian, sehingga menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.
4. Isu kepegawaian yang terjadi di PTNbh **memiliki kelayakan**, karena isu ini logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan mulai dari para pegawai PTNbh, sivitas akademika dan para pimpinan PTNbh serta para Pejabat di kementerian atau lembaga negara terkait, berdasarkan prinsip demokrasi, penegakkan hak asasi, dan kesadaran berkonstitusi serta kesadaran hukum.

Sesuai dengan hal tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini dapat secara komprehensif mengungkapkan fakta-fakta tentang sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja yang berlaku di PTNbh khususnya di lingkungan UPI.

B. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dalil yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985, hlm. 39) bahwa,

Peneliti berperan sebagai instrumen (*human instrument*) yang utama” yang secara penuh mengadaptasikan diri ke dalam situasi yang dimasukinya, sehingga proses penelitian sangat penting daripada hasil yang diperoleh. *Human Instrument* ini dibangun atas dasar pengetahuan dan menggunakan metode yang sesuai dengan tuntutan penelitian.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Creswell (1998) bahwa “peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Instrumen utama dalam penelitian adalah penulis sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara” (hlm. 264).

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antar manusia, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak dengan orang-orang di sekitar lokasi penelitian. Dengan demikian penulis lebih leluasa mencari informasi dan data yang terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi literatur.

a. Observasi

Observasi partisipatif dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung di lapangan dan mengamati perilaku individu dan mengikuti beberapa aktivitas terkait kegiatan pelaksanaan sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang seutuh mungkin dengan memperhatikan tingkat peluang kapan dan dimana serta kepada siapa peneliti sebagai instrumen dapat menggali, mengkaji, memilih, mengorganisasikan, dan mendeskripsikan informasi selengkap mungkin. Dengan keberadaan di lapangan, maka dapat diperoleh data yang kaya untuk dijadikan bahan analisis dasar yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Wawancara Mendalam

Menurut Moleong (2010) dan Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa,

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Wawancara merupakan kegiatan dialogis yang dilakukan peneliti dengan sumber data. Peneliti dapat melakukan dialog secara langsung dengan sumber data sehingga dapat mengungkap pernyataan dari sumber data secara bebas. Hal tersebut dilakukan untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain agar lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dengan langkah-langkah sebagaimana Lincoln and Guba (dalam Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa,

langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, (2) menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, (3) membuka alur wawancara dan melangsungkan alur wawancara, (4) mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, (5) menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan, (6) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan photo (video) yang berhubungan dengan rumusan masalah. Hasil pengkajian dokumen akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

d. Studi Literatur

Menurut Straus dan Corbin (2009) mengenai pengertian studi literatur, mengemukakan bahwa,

Studi literatur ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengkajian literatur untuk kepentingan penelitian ini adalah berupa literatur teknis dan literatur non-teknis. Literatur teknis, seperti laporan tentang kajian penelitian dan karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teoretik atau filosofis. Sedangkan literatur non-teknis seperti: biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog, dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara.

Dalam teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja tenaga kependidikan di PTNbh.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau situs penelitian ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah mengimplementasikan otonomi PTNbh.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif bertalian dengan tujuan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cresswell (2009, hlm. 266) bahwa, “partisipasi dan lokasi penelitian itu dipilih secara sengaja dan penuh perencanaan, penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah penelitian”.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan subjek penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat sebanyak mungkin memperoleh informasi dengan segala kompleksitas yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pegawai dan sistem pengelolaan tunjangan kinerja tenaga kependidikan yang berada di PTNbh UPI. Meskipun demikian, pemilihan subjek penelitian tidak dimaksudkan untuk mencari persamaan yang mengarah pada pengembangan generalisasi, melainkan untuk mencari informasi secara rinci yang sifatnya spesifik yang memberikan citra khas dan unik.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian yakni, “latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*)” (Miles dan Huberman, 007, hlm. 56; Cresswell 2009, hlm.267).

Kriteria *pertama* adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data, yakni wawancara di rumah, wawancara di kantor, wawancara formal dan informal, berkomunikasi resmi, dan berkomunikasi tidak resmi. Kriteria *kedua*, pelaku, yang dimaksud adalah subjek yang dikenai kebijakan sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja yang diberlakukan di PTNbh serta praktisi/birokrat/birokrat pakar. Untuk kriteria *kedua* ini Penulis sebut sebagai informan penelitian dengan mengadaptasi format Kerangka Informan Penelitian dari Simanungkalit (2012, hlm. 138) sebagai berikut.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 3.1
Kerangka Informan Penelitian

No.	Kelompok	Instansi	Informan
1.	Pengambil Kebijakan (<i>Decision Maker</i>)	a. Kementerian Ristekdikti;	a. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti; b. Kepala Biro SDM
		b. Kementerian PAN-RB;	Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Kepengawasan Kemenpan RB
		c. Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Kepala Bidang Wasdalbidang gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
		d. Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kepala Komisi ASN
		e. Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Anggaran
2.	Situs Penelitian	Unit Kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	a. Kelompok Pejabat Struktural setara Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. b. Kelompok Fungsional Tenaga Kependidikan (Staf)
3.	Ahli dan/atau Birokrat Pakar	Praktisi dan Pakar	Ahli/Pakar bidang: a. Psikologi Pendidikan; b. Manajemen; c. Kebijakan Publik; dan d. Kepegawaian. e. Hukum Pendidikan

Sumber: Kerangka Informan Penelitian dari Simanungkalit (2012, hlm. 138) diolah peneliti tahun 2019.

Berdasarkan kelompok di atas kemudian sesuai dengan instansinya masing-masing oleh Penulis dijadikan sebagai Subjek Terfokus (ST) dan berdasarkan Subjek Terfokus itu diberi Kode Subjek sehingga untuk masing-masing Subjek Terfokus diberi Kode Subjek (ST), seperti tampak pada tabel berikut.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 3.2
Penentuan Subjek Terfokus Dan Kode Subjek

No.	Instansi	Subjek Terfokus	Kode Subjek
1	Kementerian Ristekdikti (1) dan (2)	A B	ST-A ST-B
2	Kementerian PAN-RB	C	ST-C
3	Badan Kepegawaian Negara (BKN) (1)	D	ST-D
4	Komisi Aparatus Sipil Negara	E	ST-E
5	Kementerian Keuangan	F	ST-F
6	Unit Kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) (1), (2), dan (3)(n)	G H I(n)	ST-G ST-H ST-I(n)*)
7	Ahli dan Birokrat Pakar (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)	J K L M N O	ST-J ST-K ST-L ST-M ST-N ST-O

Sumber: diolah peneliti tahun 2019

Catatan: *) (n) adalah sejumlah responden yang diberi angket untuk memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan untuk memperoleh persepsi dan harapan terkait kebijakan umum universitas khususnya dalam sistem Pengelolaan Pegawai dan sistem Tunjangan Kinerja/ Remunerasi/Insentif atau sebutan lain di PTNbh UPI.

Kriteria *ketiga* adalah peristiwa, yang dimaksud adalah pandangan, pendapat dan penilaian tentang pelaksanaan sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja di PTNbh.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pengumpulan data dari responden didasarkan pada ketentuan atau kejenuhan data dan informasi yang diberikan.

3. Sumber Data

Informasi dalam bentuk lisan dan tulisan dalam penelitian kualitatif berturut-turut menjadi data primer dan sekunder penelitian. Data primer yang dikumpulkan mencakup persepsi dan pemahaman personal serta deskripsi lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian; sedangkan data sekunder adalah data

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai jumlah person dan kualifikasinya serta berkas kertas kerja yang dapat mengungkapkan informasi tentang sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja tenaga kependidikan di PTNbh dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

Sesuai dengan bentuk-bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka sumber-sumber data penelitian ini meliputi manusia, benda, dan peristiwa. Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data, berstatus sebagai informan mengenai fenomena atau masalah sesuai dengan fokus penelitian. Benda merupakan bukti fisik yang berhubungan dengan fokus penelitian, sedangkan peristiwa merupakan informasi yang menunjukkan kondisi yang berhubungan langsung dengan sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja tenaga kependidikan di PTNbh dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap pra penelitian ini yang pertama kali dilakukan adalah memilih masalah, menentukan judul dan lokasi penelitian dengan tujuan menyesuaikan keperluan dan kepentingan fokus penelitian yang akan diteliti. Setelah masalah dan judul penelitian dinilai tepat dan disetujui oleh pembimbing, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal tentang subjek yang akan diteliti.

Setelah diperoleh gambaran mengenai subjek yang akan diteliti serta masalah yang dirumuskan relevan dengan kondisi objektif di lapangan, selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap pra penelitian selesai, maka penulis mulai terjun ke lapangan untuk memulai penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari responden. Selain mengumpulkan hasil observasi di lapangan penulis juga memperoleh data melalui wawancara dengan responden.

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan responden, penulis menuliskan kembali data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar dapat mengungkapkan data secara terperinci. Data yang diperoleh dari

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hasil wawancara, disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh dokumen lainnya.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, obeservasi dan studi dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Peneliti dapat memilih dan menggunakan model-model yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya atau bersifat pemilihan (*eclectic*). Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua model teknik analisis yaitu dari Miles & Huberman dan Creswell.

Proses analisis data kualitatif mencakup penggalian makna yang ada di dalam data tertulis maupun gambar. Sebagaimana dikatakan bahwa, “proses ini meliputi persiapan analisis data, analisis pemilahan data, penggalian makna yang mendalam terhadap data, menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data” (Creswell, 2009, hlm. 190).

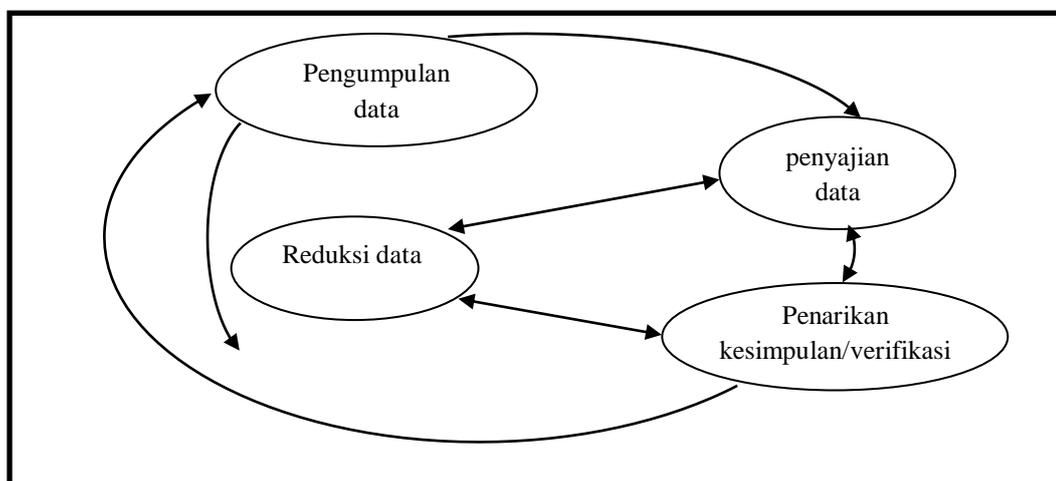
Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi terhadap data “kasar” yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, pembuangan yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. Setelah data tersaji secara baik dan terorganisasi maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2007, hlm. 21-22):

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman (2007, hlm. 20)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya yang cukup banyak, memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Untuk itu data dirangkum dan dipilih hanya hal-hal yang pokok dan penting.

b. Display data

Dalam tahap ini, peneliti menyajikan data-data dalam bentuk deskripsi berdasarkan aspek-aspek yang diteliti sesuai rumusan penelitian. Data-data tersebut, antara lain mengenai data ideal berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan data faktual berupa kasus-kasus kepegawaian –dan tunjangan kinerja, data berupa pendapat responden Tenaga Kependidikan dan pendapat praktisi/birokrat/birokrat pakar, serta teori yang relevan.

c. Kesimpulan/verifikasi

Endang, 2021
 TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kesimpulan diambil secara bertahap, diawali dengan pengambilan kesimpulan sementara. Namun dengan bertambahnya data kemudian dilakukan verifikasi data yaitu dengan mempelajari kembali data-data yang ada (yang direduksi maupun disajikan). Untuk penguatan keputusan yang dibuat, peneliti juga meminta pertimbangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Setelah hal itu dilakukan, peneliti mengambil keputusan akhir.

Langkah-langkah di atas diterapkan dalam proses analisis data penelitian ini hingga tercapainya deskripsi temuan penelitian sebagaimana disajikan dalam Bab IV.

E. Penentuan Responden dan Kisi-Kisi Penelitian

1. Responden

Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif, maka subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *snow ball sampling*, artinya,

subjek penelitian relatif sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian, namun subjek penelitian dapat terus bertambah sesuai keperluannya. Dalam penelitian ini, teknik *snow ball sampling* dilakukan apabila dalam pengumpulan datanya tidak cukup hanya dari satu sumber, maka dikumpulkan juga data dari sumber-sumber lain yang berkompeten. Teknik-teknik penentuan jumlah subjek penelitian seperti ini adalah *snowball sampling* (Bogdan & Biklen, 1982; Miles & Huberman, 2007; dan Nasution, 1996, hlm. 11, 33).

Adapun subjek penelitian yang penulis pilih adalah pegawai Tenaga Kependidikan di PTNbh yang sedang menduduki jabatan struktural dan staf, serta para praktisi/birokrat/birokrat pakar yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

2. Kisi-kisi penelitian

Nasution (1996, hlm. 9) berpendapat bahwa, “peneliti adalah *key instrument* yakni peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengamat, untuk mengumpulkan data secara mendalam yang dibantu dengan pedoman observasi dan pedoman wawancara”. Agar penelitian ini terarah, maka sebelum melakukan penelitian ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara, studi dokumentasi, dan observasi.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

F. Uji Validitas Data Penelitian

1. Triangulasi

Pengujian validitas data dalam hasil penelitian ini menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur pada sumber yang sama yaitu dengan melakukan pengecekan ulang temuan antar sumber data, metode pengumpul data dan teori yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Creswell (1998, 286) mengemukakan bahwa,

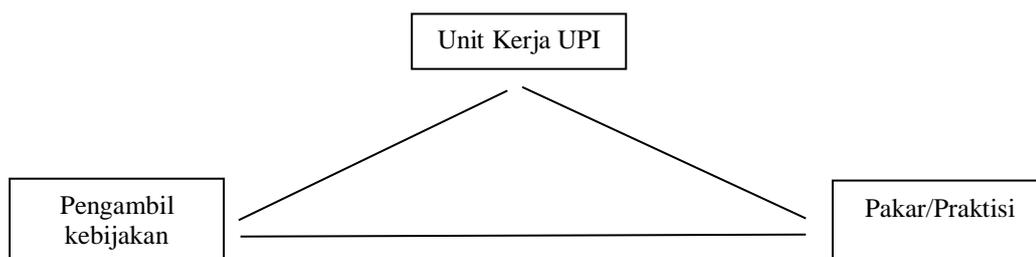
Triangulasi adalah mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara kohern. Triangulasi dipandang penting dilakukan oleh peneliti kualitatif karena dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam memeriksa kembali bukti dari beberapa sumber yang peneliti dapatkan dalam penelitian kali ini menggunakan dua bentuk triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber (lihat gambar 3.2.) dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian data tersebut ditanyakan pada informan lain yang masih terikat satu sama lain.

Gambar 3.2. Triangulasi sumber



Sumber: diolah oleh Penulis 2020

b) Triangulasi teknik

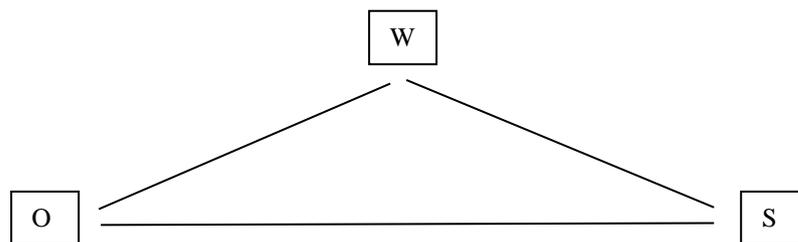
Triangulasi teknik (lihat gambar 3.3.) dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data antara wawancara dengan dokumen.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.3. Triangulasi teknik



Sumber: diolah oleh Penulis 2020

2. Member Check

Dalam tahap *member-check* dilakukan pemantapan informasi atau data penelitian yang telah terkumpul selama tahap eksplorasi atau studi lapangan, dengan demikian hasil penelitiannya diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dalam kaitan itu, data yang diperoleh melalui penggunaan teknik wawancara dibuat dalam bentuk transkrip.

Demikian juga halnya dengan data yang diperoleh melalui penggunaan teknik studi dokumentasi, dan data yang diperoleh melalui teknik observasi dibuat dalam bentuk catatan-catatan lapangan. Kemudian, peneliti menunjukkannya kepada informan. Peneliti meminta mereka membaca dan memeriksa kesesuaian informasinya dengan apa yang telah dilakukan. Apabila ditemukan ada informasi yang tidak sesuai, maka peneliti harus segera berusaha memodifikasinya, apakah dengan cara menambah, mengurangi, atau bahkan menghilangkannya sampai kebenarannya dapat dipercaya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (1998, hlm. 287) bahwa, “*member check* adalah membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat”.

G. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	bulan ke-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan:									
	A. Penyusunan proposal	X								
	B. Perencanaan kegiatan	X	X							

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	C. Penyusunan desain	X	X							
2.	Pelaksanaan:									
	A. Tahap pengumpulan data			X						
	B. Tahap penyusunan data			X	X					
	C. Tahap analisis data			X	X					
	D. Tahap perbandingan					X				
	E. Kesimpulan penelitian						X	X		
3.	Penyusunan laporan							X	X	X

Catatan: Jadwal di atas dapat berubah sesuai dengan keadaan

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu